



# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
2019**

---

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>	
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iii</b>	
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>iv</b>	
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>v</b>	
<b>BAB I. Pendahuluan</b>		
1.1 Latar Belakang .....	I-1	
1.2 Landasan Hukum .....	I-2	
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-4	
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5	
<b>BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II-1	
2.2 Sumber Daya .....	II-8	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-12	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-18	
<b>BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah</b>		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	III-1	
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....	III-2	
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur .....	III-4	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-5	
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-6	
<b>BAB IV. Tujuan dan Sasaran</b>		
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	IV-1	
<b>BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan</b> .....		<b>V-1</b>
<b>BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan</b> .....		<b>VI-1</b>
<b>BAB VII. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan</b> .....		<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII. Penutup</b> .....		<b>VII-1</b>

---

## Daftar Tabel

Tabel	Halaman
2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	II-9
2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	II-9
2.3 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan Ruang .....	II-9
2.4 Daftar Nama Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan .....	II-11
2.5 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja.....	II-13
2.6 Capaian Nilai SAKIP Dinas Perikanan.....	II-13
2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang .....	II-14
2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan .....	II-16
2.9 Komprasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan.....	II-19
2.10 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kab. Sampang .....	II-20
2.11 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kab. Sampang .....	II-21
3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah .....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi Serta Permasalahan Pelayanan OPD .....	III-3
3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Kelautan Dan Perikanan RI Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-5
3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan RI Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-5
3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-6
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kab. Sampang.....	IV-2
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	V-2
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	VI-1
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-1
7.2 Keterhubungan Renstra Dinas Perikanan dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 .....	VII-2

---

# Daftar Gambar

Gambar / Diagram	Halaman
2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang .....	II-2
3.1 Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 .....	III-3

---

# Daftar Lampiran

Lampiran

Lampiran 1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kel. Sasaran dan Pendanaan Indikatif

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis atau Renstra sendiri merupakan konsep yang digunakan dalam menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Salah satu fungsi dari Rencana strategis adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, acuan program/kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah. Rencana strategis fokus pada upaya sistematis yang dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi serta pengembangan suatu tujuan tertentu. Melalui perencanaan strategis seluruh jajaran Dinas Perikanan berkomitmen untuk membangun tujuan yang konkrit dengan mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi spesifik berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi dan lingkungan, meliputi kekuatan internal dan eksternal, termasuk peluang, kecenderungan dan dampak terhadap organisasi.

Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra berfungsi untuk mendeskripsikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolak ukur pencapaiannya. Renstra dapat digunakan untuk mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

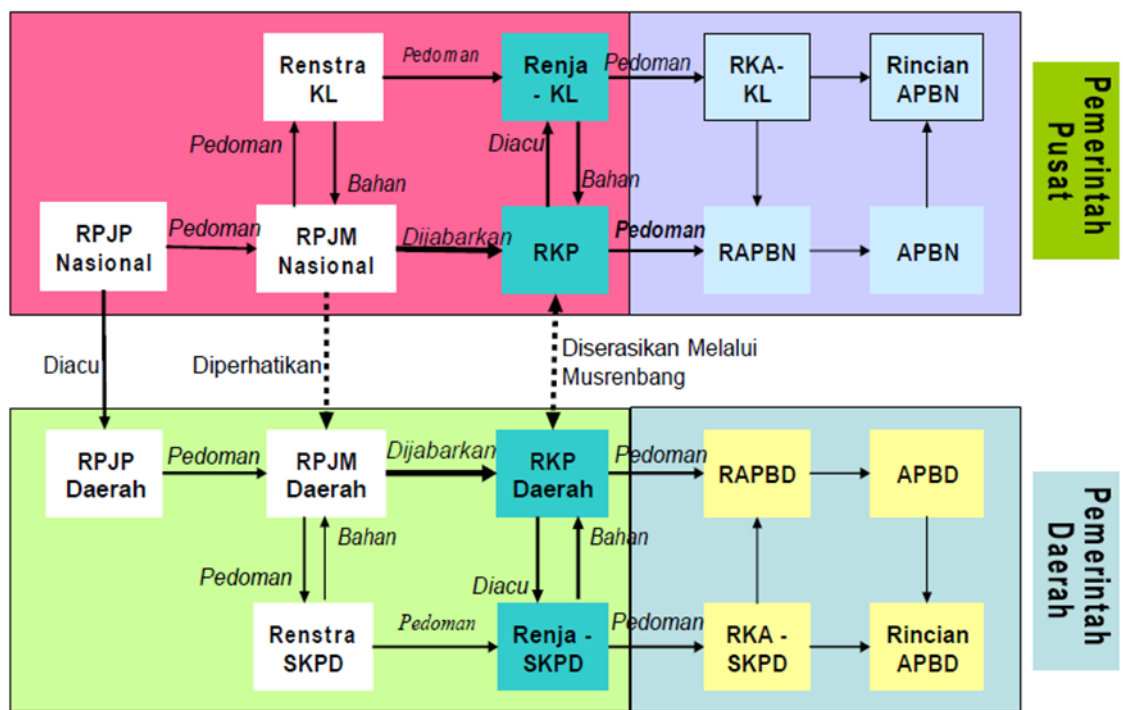
Pemerintah melalui Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mengamatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan RPJMD menjadi Peraturan Daerah

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu; (a) alur proses teknokratis-strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur proses politislegislasi. Ketiganya

menjadi kerangka acuan bagi OPD dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan bukanlah dokumen perencanaan yang berdiri sendiri, tetapi mempunyai kaitan dengan dokumen RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga berkaitan dengan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.

Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini :



Selain mengacu pada RPJMD, tentunya dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang diselaraskan dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan sinergisitas antara perencanaan di pusat, propinsi, dan daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah;



10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel serta selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan dari Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah sebagai :

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda;
2. Tersedianya dokumen acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan;

3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

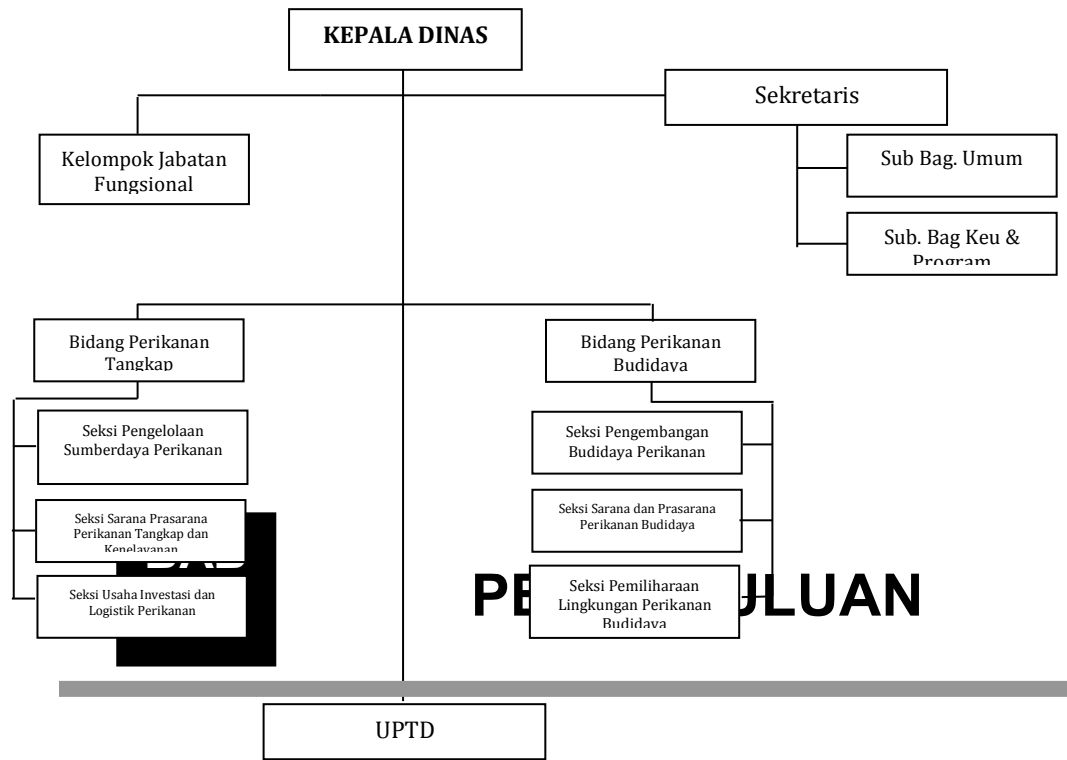
Diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada lahirnya Perbup No. 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.

Secara umum kondisi internal Dinas Perikanan Kabupaten Sampang cukup kondusif dan relevan sehingga memberikan peluang cukup besar bagi segenap jajaran pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan baik. Hal demikian diindikasikan oleh perkembangan sumber daya internal organisasi dan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan sistem perencanaan pembangunan partisipatif.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Perbup No. 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Keputusan Bupati Sampang : No. 63 tahun 2017



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam beorganisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang harus dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rencana strategis (Renstra) SKPD merupakan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD akan dikembangkan apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tercapai.

- Dengan demikian, rencana strategis SKPD merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelaksanaan Dinas Perikanan terdini atas:
- Kepala Dinas;** SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Kepala Daerah Terpilih.
  - Sekretaris,** membawahi 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Kepala Daerah Terpilih.
  - Bidang Perikanan Tangkap,** membawahi pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) langkah-langkah strategis apa yang dilakukan oleh SKPD agar tujuan tercapai. Rencana strategis berfungsi mengklarifikasi secara eksplisit visi dan misi Bupati dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam strategi kebijakan dan program prioritas SKPD serta tolok

3. Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.

**d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :**

1. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan;
2. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya;
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Perikanan Budidaya.

**e. UPT Dinas ; dan**

**f. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Tugas Dan Fungsi**

**1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan hubungan masyarakat dan protocol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- laksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaannya;

- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**a. Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. Sub Bagian Keuangan dan Program**, mempunyai tugas :

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengolahan data;
- Melaksanakan perencanaan program;
- Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan laporan;
- Menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;

- Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **2. Bidang Perikanan Tangkap**

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap;
- Pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap;
- Penerapan teknologi dan penyediaan sarana perikanan tangkap;
- Pembinaan dan pengembangan organisasi/kelembagaan nelayan;
- Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan bidang perikanan tangkap; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **a. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan**, mempunyai tugas :

- Melaksanakan identifikasi dan evaluasi teknologi penangkapan ikan dan eksploitasi sumberdaya perikanan tangkap;
- Melaksanakan kebijakan dan penerapan teknologi perikanan tangkap
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana pemanfaatan dan pembinaan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap;
- Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya perikanan tangkap;
- Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok usaha bersama perikanan tangkap;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan organisasi nelayan;



- Melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluh dan pelayanan terhadap masyarakat perikanan tangkap;
- Melaksanakan program pendampingan dan fasilitasi kemitraan usaha bagi nelayan kecil; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

**b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Kenelayanan** mempunyai tugas:

- Melaksanakan inventarisasi terhadap pembangunan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- Menyiapkan koordinasi perlindungan dan kebijakan kenelayanan;
- Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha, Pendataan Usaha Perikanan Tangkap dan permodalan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

**c. Seksi Usaha, Investasi dan Logistik Perikanan**, mempunyai tugas :

- Melaksanakan Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Tangkap;
- Melaksanakan pembinaan kelompok usaha Perikanan Tangkap, Usaha Pengolah dan Pemasar Ikan Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- Melaksanakan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT (*Gross Tonnage*) dan identifikasi alat tangkap dan produksinya;
- Melaksanakan Pengawasan dan Penanganan Mutu Hasil Perikanan Tangkap;
- Melaksanakan Identifikasi Usaha Perikanan Tangkap, Pengolah dan Pemasar Ikan;
- Melaksanakan survey dan monitoring harga pasar; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

### 3. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perikanan budidaya. Untuk melaksanakannya, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan garam;
- Pengamatan, perumusan dan pemetaan wilayah budidaya dan konservasi perikanan;
- Pembinaan pelaksanaan teknis budidaya dan produksi perikanan termasuk garam;
- Pembinaan pelaksanaan teknis pembenihan dan kesehatan ikan;
- Pembinaan pelaksanaan teknis pelestarian dan perlindungan perikanan;
- Pembinaan standarisasi pengelolaan induk dan benih ikan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**a. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan** mempunyai tugas :

- Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha budidaya ikan dan garam;
- Menyiapkan bahan bimbingan dan pelatihan teknologi budidaya dan pembenihan;
- Melakukan pendataan produksi budidaya ikan dan garam inventarisasi kawasan potensial;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

**b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya**, mempunyai tugas :

- Melakukan investarisasi dan identifikasi penggunaan sarana dan prasarana perikanan hudidaya termasuk garam;
- Melakukan pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana perikanan budidaya termasuk garam;
- Melakukan sosialisasi terhadap standarisasi penggunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya/garam;
- Melaksanakan TPUPI (Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan) dan TPKPHI (Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

c. **Seksi Pemeliharaan Lingkungan Perikanan Budidaya**, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan ikan budidaya dan lingkungan;
- Melakukan inventarisir, identifikasi, dan evaluasi perairan dalam upaya pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan budidaya dan lingkungannya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

#### **4. Unit Pelaksana Teknis**

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

### **2.2. Sumber Daya**

#### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan sektor perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumberdaya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Personel Dinas Perikanan Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**  
**(Posisi Per 31 Agustus 2019)**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	12
2	Perempuan	10
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Jumlah personel Laki-laki 52 % dan jumlah personel perempuan 48 %. Hal ini menunjukkan pegawai Dinas Perikanan antara jumlah laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda yang artinya responsif gender.

**Tabel 2.2.**  
**Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**(Posisi Per 31 Agustus 2019)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	8
2	Sarjana (S1)	8
3	Diploma	2
4	SLTA	4
5	SLTP	-
6	SD	-
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Sebesar 36,36% pegawai Dinas Perikanan merupakan lulusan pasca sarjana (S2) dan lulusan Sarjana (S1), 9% lulusan Diploma, 18,18% lulusan SLTA, dan 0% lulusan SLTP dan SD. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendidikan pegawai terbanyak di Dinas Perikanan merupakan lulusan Pasca Sarjana dan Sarjana. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

**Tabel 2.3.**  
**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang**  
**(Posisi Per 31 Agustus 2019)**

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2	Pembina Tk I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	5
4	Penata Tk I (III/d)	5
5	Penata (III/c)	3
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
7	Penata Muda (III/a)	3
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1

No	Golongan	Jumlah (org)
9	Pengatur (II/c)	1
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
11	Pengatur Muda (II/a)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>
12	Juru Tingkat I (I/d)	-
13	Juru (I/c)	-
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
15	Juru Muda (I/a)	-
	<b>Jumlah</b>	
16	CPNS	
17	Penata Muda (III/a)	
18	Pengatur (II/c)	
	<b>Jumlah</b>	
19	PTT	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>22</b>

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Pembina (IV/a) dan Penata Tk. I (III/d) yaitu masing -masing 5 orang atau sebesar 22,72 %.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Perikanan Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Sampang**  
**(Per 31 Agustus 2019)**

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	SATUAN	KEADAAN BARANG (B/KB/RB)	JUMLAH BARANG
1	2	3	4	5
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bidang	Baik	1
3	Tambak Perikanan	Bidang	Baik	1
4	Sepeda Motor	Paket	B=15 KB=20	35
5	Gorden	Unit	KB	180
6	Rak Buku/Kembang	Unit	Baik	2
7	Filling Besi/Metal	Unit	Baik	5
8	Lemari Kaca	Unit	Baik	2
9	Papan Visual	Unit	KB	14
10	Karpet/Permadani	Unit	Baik	14
11	Finger Print	Unit	Baik	1
12	CCTV	Paket	Baik	1
13	Papan Informasi	Unit	Baik	1
14	Lemari Penyimpanan	Unit	Baik	4
15	Meja Rapat	Unit	B = KB = 2	3
16	Kursi Rapat	Unit	Baik	2
17	Kursi Tamu	Unit	Baik	2
18	Kursi Putar	Unit	KB	4
19	Mesin Potong Rumput	Unit	RB	1
20	AC	Unit	Baik	1
21	Handy Cam	Unit	Baik	1
22	Tangga Aluminium	Unit	RB	1
23	Podium	Unit	Baik	1
24	Kamera Digital	Unit	Baik	1
25	Laptop Toshiba	Unit	KB	1
26	Note Book	Unit	KB	10
27	CPU	Unit	Baik	3
28	Monitor	Unit	Baik	2
29	Printer	Unit	Baik	9
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	Baik	1
31	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	Baik	1
32	Meja Kerja Pegawai	Unit	Baik	10
33	Meja Kerja Staf	Unit	KB	8
34	Meja Kerja	Unit	KB	12
35	Meja Rapat Panjang	Unit	Baik	2
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	Baik	4
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	Baik	3
38	Lemari Arsip	Unit	Baik = 4 KB = 3	7
39	Proyektor	Unit	Kurang Baik	1
40	SoundSystem	Unit	Baik	1
41	Komputer PC	Unit	Baik = 1 KB = 1	2
42	Lapotop Dell	Unit	Baik	3

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	SATUAN	KEADAAN BARANG (B/KB/RB)	JUMLAH BARANG
1	2	3	4	5
43	Printer	Unit	Baik	4
44	Papan Data Statistik	Unit	Baik	3
45	Meja Kerja Pejabat	Unit	Baik	10
46	Mobil suzuki	Unit	Baik	1
47	Papan Nama Tambak	Unit	Baik	1
48	Kincir Air	Unit	KB	6
49	Pompa Air	Unit	KB	1
50	Telp. PABX	Unit	Baik	1
51	Kursi Rapat	Unit	Baik = 25 KB =15	40
52	Lemari Rapat	Unit	Baik	4
53	Locker 4 Pintu	Unit	Baik	2
54	Laptop dell	Unit	Baik	3

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana tetap dalam kondisi baik demi stabilitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Penilaian Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Penilaian terhadap SAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Sampang selama 3 (tiga) terakhir adalah:

**Tabel 2.6**  
**Capaian Nilai SAKIP Dinas Perikanan**

No	Tahun	Capaian Nilai SAKIP	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	2016	BB	Sangat Baik
2.	2017	BB	Sangat Baik
3.	2018	BB	Sangat Baik



**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	Target Renstra PD Tahun Ke						Realisasi						Rasio Capaian Tahun Ke					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Produksi perikanan tangkap dalam 1 tahun			√	16.887,60	17.732	18.618,60	7.273,48	7418,95	7.567,33	9.296,58	9.347,40	7.130,86	7.543,71	6.965,59	9.336,25	55,04	55,35	38,30	103,71	93,88	123,35
	a. Laut																					
	b. Perairan umum			√	14,32	29,19	14,90	23,22	23,68	24,15	28,90	28,82	22,77	17,73	21,16	18,2	201,8	98,73	152,81	76,35	89,35	75,36
2	Jumlah Produksi perikanan budidaya dalam 1 tahun			√	622,8	629,2	635,3	625,00	648,1	654,6	29,05	34,84	50,05	60,18	62,48	101,318	46,64	55,37	78,78	96,29	111,83	15,47
	. Kolam																					
	b. Tambak			√	2.497,8	2.770,7	2.548,2	7.982,00	2651,18	2704,20	274,57	524,98	655,99	750,14	662,17	808,199	109,92	189,48	257,43	93,97	24,97	297,51
3	Jumlah Produksi garam			√	223.3271	230.176	237.295	244.634	252.200	260.000	169.960.00	280.411.00	398.983.60	4.606.76	170.568.45	346.665.00	73,84	121,82	168,13	188,31	67,63	120

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 capaian indikator kinerja sasaran yang sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Jumlah produksi perikanan tangkap untuk laut lebih dari 100%, capaian indikator tersebut adalah 123,35 sedangkan untuk produksi Perairan Umum Daratan (PUD) tidak tercapai 100%, capaian indikator tersebut adalah 75,36.
2. Jumlah produksi perikanan budiya untuk indicator kolam kurang dari 50%, capaian indicator tersebut adalah 15,47%. Sedangkan untuk indicator tambak lebih dari 100%, capaian indicator tersebut adalah 297,51%.
3. Untuk indikator jumlah produksi garam capaian indicator tersebut adalah sebesar 100%.

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.705.288.780	3.823.965.022	3.941.808.380	4.096.459.106,19	2.782.587.911	1.757.558.470	2.182.333.812	3.459.496.114	3.737.920.621	4.066.305.143	2.481.612.097	1.583.014.216	58.90	90.46	94.82	99.26	89.18	90.06		
<b>PAD</b>	629.994.520	698.488.972	818.420.400	830.811.840	538.829.472	- 4.000.000 - 2.000.000	558.836.020	603.548.480	705.414.397	724.719.840	670.613.089	- 128.804.272 - 2.007.220	88.70	86.40	86.12	87.23		- - 100		
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.366.578.300.00	8.357.355.703.00	8.628.466.000.00	8.262.270.999.00	4.899.228.243.00	5.531.230.650.00	5.898.672.695.00	7.986.191.085.00	8.120.253.924.00	7.997.775.518.00	3.693.920.428.00	4.889.551.599.00	92.65	95.56	94.11	96.80	75.40	88.40	<b>-1,89</b>	<b>-4,58</b>
Program pelayanan administrasi perkantoran	446,561,500.00	470,186,400.00	482,813,000.00	454,193,000.00	450,751,000.00	485,901,300.00	391,404,445.00	439,396,652.00	447,203,890.00	436,623,035.00	366,448,062.00	417,278,064.00	87.65	93.45	92.62	96.13	81.30	85.88	2,17	1,61
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	288,092,500.00	2,164,120,000.00	2,094,425,000.00	297,638,247.00	737,034,000.00	485,003,250.00	263,741,750.00	2,081,807,408.00	1,950,562,250.00	290,624,750.00	718,961,930.00	436,935,632.00	91.55	96.20	93.13	97.64	97.55	90.09	13,84	13,45
Program peningkatan disiplin aparatur	24,050,000.00	-	-	28,600,000.00	-	-	23,976,000.00	-	-	28,600,000.00	-	-	99.69	#DIV/0!	#DIV/0!	100.	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60,500,000.00	64,400,000.00	67,000,000.00	26,500,000.00	55,000,000.00	47,000,000.00	28,155,200.00	60,885,500.00	59,615,000.00	25,810,363.00	17,851,200.00	2,255,000.00	46.54	94.54	88.98	97.40	32.46	4.80	-6,32	-46,80
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	15,155,500.00	18,371,050.00	3,336,000.00	19,000,000.00	26,778,000.00	27,581,100.00	15,087,000.00	17,745,025.00	3,244,000.00	18,947,000.00	25,408,000.00	24,293,400.00	99.55	96.59	97.24	99.72	94.88	88.08	15,98	12,64
Program pemberdayaan ekonomi	70,398,750.00	372,516,250.00	323,100,000.00	868,792,000.00	901,095,000.00	250,000,000.00	25,530,000.00	289,031,250.00	307,043,000.00	840,100,950.00	833,466,368.00	192,785,000.00	36.26	77.59	95.03	96.70	92.49	77.11	37,26	65,76

masyarakat pesisir																				
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum	22,704,250.00	-	97,000,000.00	48,543,000.00	78,864,250.00	78,500,000.00	21,115,400.00	-	92,796,700.00	48,004,000.00	54,427,250.00	75,452,000.00	93.00	#DIV/0!	95.67	98.89	69.01	96.12	36.28	37.48
Program pengembangan perikanan tangkap	4,752,136,958.00	4,573,351,208.00	4,655,253,000.00	5,040,717,022.00	1,754,105,993.00	674,510,000.00	4,506,825,800.00	4,367,211,750.00	4,535,249,864.00	4,893,978,875.00	831,856,618.00	602,309,250.00	94.84	95.49	97.42	97.09	47.42	89.30	-38.83	-39.53
Program pengembangan budaya perikanan	242,499,800.00	368,317,500.00	469,650,000.00	1,178,494,500.00	683,138,000.00	2,855,000,000.00	224,242,100.00	365,575,250.00	450,494,750.00	1,136,201,375.00	645,253,000.00	2,537,365,310.00	92.47	99.26	95.92	96.41	94.45	88.87	85.23	62.31
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	56,327,000.00	60,620,000.00	30,000,000.00	66,229,500.00	102,053,000.00	-	51,017,000.00	58,730,000.00	29,555,000.00	65,513,000.00	102,048,000.00	-	90.57	96.88	98.52	98.92	100	#DIV/0!	0	0
Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi	388,152,042.00	265,473,295.00	405,889,000.00	233,563,730.00	110,409,000.00	627,735,000.00	347,578,000.00	305,808,250.00	244,489,470.00	213,372,170.00	98,200,000.00	600,877,943.00	89.55	115.19	60.24	91.36	88.94	95.72	12.77	83.40

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Dinas Perikanan yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar -1,89 persen dan realisasinya sebesar -4,58 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan pertumbuhan target sebesar 85,23 persen dan realisasinya sebesar 62,31 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target sebesar (-6,32) persen dan realisasi sebesar (-46,80) persen. Hal ini dikarenakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN tidak dianggarkan setiap tahun melainkan dianggarkan sesuai dengan kebijakan daerah.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi.

**Tabel 2.9**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap**  
**Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi**  
**dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

No.	Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sampang	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sampang	Sasaran pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah produksi perikanan perikanan tangkap dalam 1 tahun a. Laut b. Perairan Umum	a. 9.336,25 (ton) b. 18,20(ton)	Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelutan dan Perikanan
2.	Jumlah produksi perikanan budidaya dalam 1 tahun a. Kolam b. Tambak	a. 101,318 (ton) b. 808,199 (ton)		
3.	Jumlah Produksi Garam	346,665.00 (ton)		

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra Dinas Perikanan yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Propinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik propinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

#### **2.4.1. Hasil telaahan terhadap RTRW**

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Hasil telaahan struktur ruang wilayah kabupaten Sampang, pada kinerja pelayanan Dinas Perikanan bisa dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini:

**Tabel 2.10**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah**  
**Kabupaten Sampang**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rencana Jaringan Transportasi	Rencana Jaringan Transportasi	Pengembangan Jalan Lingkar Selatan dan Srepong	Sesuai	Pengembangan wilayah pantai selatan dan pantai utara

Dari tabel 2.9 di atas menunjukkan bahwa rencana struktur ruang saat ini yaitu rencana jaringan transportasi. Sedangkan indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan yaitu pengembangan jalan lingkar selatan dan Srepong. Sehingga pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perikanan sesuai. Arahan lokasi pengembangan pelayanan yaitu pengembangan wilayah pantai selatan dan pantai utara.

#### 2.4.2. Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan

dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Hasil telaahan pola ruang wilayah kabupaten Sampang bisa dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini:

**Tabel 2.11**  
**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah**  
**Kabupaten Sampang**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Binaan Pelaku Usaha Perikanan	Binaan Pelaku Usaha Perikanan	Konservasi Mangrove, Cemara Udang dan Ekowisata Pantai	Prioritas program pengembangan produksi perikanan pada pelaku usaha perikanan (KUB PT, Poklhasar dan Pokmaswas)	14 Kecamatan di Kabupaten Sampang
2	Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya Air Payau	Pengembangan Kawasan Perikanan	Prioritas program pengembangan kawasan perikanan budidaya	Kecamatan Jrengik, Sreseh, Sampang, Camplong, Pangarengan dan Banyuates



3	Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya Air Tawar	Pengembangan Kawasan Perikanan	Prioritas program pengembangan kawasan perikanan budidaya	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang
4	Kawasan Perikanan Tangkap	Kawasan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kawasan Perikanan	Prioritas program pengembangan kawasan perikanan tangkap	Kecamatan Camplong, Sampang, pangarengan, Sreseh, Banyuates, Ketapang dan Sokobanah

Dari tabel 2.10 diatas menunjukkan bahwa rencana pola ruang dan pola ruang saat ini terdiri dari binaan pelaku usaha perikanan, kawasan terumbu karang, kawasan budidaya, kawasan perikanan tangkap. Untuk kawasan budidaya pola ruang saat ini dibagi menjadi dua yaitu kawasan budidaya air payau atau garam dan budidaya air tawar.

Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan, pengaruh rencana pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dan arahan lokasi pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sampang bisa dilihat pada tabel di atas.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunann antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah:

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Perangkat Daerah**

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Masih minimya kualitas dan kuantitas SDM dan anggaran pada Dinas Perikanan selaku PD yang melakukan pelayanan terhadap pelaku usaha perikanan	Kurang optimalnya pelayanan terhadap pelaku usaha perikanan	<p><b>Faktor Internal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pada Dinas Perikanan dalam melakukan pelayanan terhadap pelaku usaha perikanan</li> <li>2. Anggaran pada Dinas Perikanan</li> </ol> <p><b>Faktor Eksternal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan</li> </ol>

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 3. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2 Tahun 2015, tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine net), di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
2	Masih kurangnya koordinasi antara Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Sinkronisasi program provinsi -daerah masih belum optimal	<b>Faktor Internal:</b> Ketersediaan informasi dan data sebagai pendukung penyusunan Renstra Dinas Perikanan <b>Faktor Eksternal:</b> Ketersediaan dan ketepatan waktu informasi dan data sebagai pendukung penyusunan Renstra Dinas Perikanan
3	Kurangnya koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan perikanan nasional, regional dan perencanaan pembangunan perikanan daerah.	Sinkronisasi program pusat-daerah masih belum optimal	<b>Faktor Internal:</b> tersediaan informasi dan data sebagai pendukung penyusunan Renstra Dinas Perikanan <b>Faktor Eksternal:</b> Ketersediaan dan ketepatan waktu informasi dan data sebagai pendukung penyusunan Renstra Dinas Perikanan
4	Kurangnya Kualitas SDM yang menangani proses penerbitan Rekomendasi Keterangan RTRW	Pelayanan terhadap pemohon rekomendasi pemanfaatan ruang belum optimal	<b>Faktor Internal:</b> Penerbitan Rekomendasi Keterangan Rencana Tata Ruang Wilayah <b>Faktor Eksternal:</b> Para pemohon rekomendasi keterangan pemanfaatan ruang/wilayah

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perikanan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

**Visi:  
“Sampang Hebat Bermartabat”**



**Gambar 3.1  
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Dinas Perikanan mendukung pada pencapaian misi 2 yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”**. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan yang dijabarkan pada Tabel 3.2 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappelitbangda yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

**Tabel 3.2.  
Telaahan Visi, Misi Kepala Perangkat Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Misi 2 Mewujudkan kemandirian</b>	1. Masih minimnya SDM dan anggaran pada Dinas	1. Keterbatasan Sumberdaya	1. Adanya kebijakan sentralisasi

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif</b></p> <p><b>Program Aksi:</b> Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pengembangan Budidaya Perikanan</p>	<p>Perikanan selaku OPD yang melakukan pelayanan terhadap pelaku usaha perikanan</p> <p>2. Belum sinergisnya proses perencanaan pembangunan perikanan nasional, regional dan perencanaan pembangunan perikanan daerah</p> <p>3. Kurangnya Sarana Prasarana bidang Perikanan</p> <p>4. Kurangnya pemahaman teknologi budidaya di masyarakat</p> <p>5. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk pengusahaan budidaya</p> <p>6. Belum optimalnya pengelolaan data</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sehingga terbatasnya pelayanan terhadap pelaku usaha perikanan</p> <p>2. Kurangnya dukungan pendanaan pada Dinas Perikanan Sampang dalam menjalankan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga keterbatasan pelayanan</p> <p>3. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani pembangunan perikanan terutama terkait dengan program kerja</p> <p>4. Masih adanya apriori terhadap partisipasi publik oleh lembaga dan pelaku birokrasi</p> <p>5. Sulitnya pemasaran produk perikanan</p> <p>6. Penggunaan jaring yang tidak ramah lingkungan</p> <p>7. Over fishing/persaingan nelayan antar daerah</p>	<p>memberikan daerah untuk fokus meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi public</p> <p>2. Status Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang diperbantukan di Dinas Perikanan Kabupaten memberikan tambahan SDM terutama sebagai petugas lapang</p> <p>3. Kebutuhan konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat</p> <p>4. Adanya dukungan dari lembaga lain/organisasi negeri maupun swasta dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program</p>

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Pada telaahan ini dikemukakan

apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan Perikanan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Belum sinerginya proses perencanaan program kerja nasional, regional dan program kerja daerah.	1. Koordinasi yang lemah antar lembaga pada sektor perikanan	Adanya pembagian wewenang pengelolaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	Kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani pembangunan perikanan terutama terkait dengan program kerja	Pengelolaan sumberdaya laut mulai 0 – 14 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi	Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan. Namun demikian dalam rangka mendukung terwujudnya dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Dinas Perikanan yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perencanaan dan pengendalian penataan kawasan sesuai RTRW	Integrasi tata ruang pada proses perencanaan belum optimal	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya dalam pengelolaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan potensi wilayah

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Masih minimnya Kualitas dan Kuantitas SDM dan anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Sampang
- b. Data dan informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan perikanan daerah;
- c. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan perikanan;
- d. Masih minimnya kemampuan masyarakat dalam pengusahaan budidaya;
- e. Masih kurangnya sarana prasarana bidang perikanan;
- f. Lemahnya distribusi pasar komoditas hasil perikanan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat;
- g. Terbatasnya sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan teknis di bidang perikanan;
- h. Optimalisasi sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan program perikanan;
- i. Pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat;

- j. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan baik berupa pemberian jaminan social bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai oleh Perangkat Daerah. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang, Tahun 2019-2024 seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang yang mendukung pencapaian misi ke - 2 Bupati Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran "**Meningkatnya Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan**", sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Dinas Perikanan dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun penjabaran atas tujuan yang akan dicapai Dinas Perikanan dalam kurun waktu 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Sampang**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET (%) KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Tujuan:</b>									
	Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	Indikator Tujuan 1. Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	5,26	5,36	5,46	6,71	6,01	6,36	6,76	6,76
		2. Nilai Tukar/Nelayan/Pembudidaya/Pe tambak Garam								
		a. NTN	n/a	101,9	102,4	103	103,7	104,6	105,6	105,6
		b. NTPi	n/a	101	103	105	107	109	111	111
		c. NTPG	n/a	113	115	117	119	121	123	123
	<b>Sasaran:</b>									
	Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan dan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Garam								
		a. Budidaya	22,05	3,93	2,98	2,89	3,37	2,72	2,65	2,65
		b. Garam	103,24	-99,92	2,91	2,83	3,09	3,00	2,91	2,91
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap								
		a. Laut	34,03	5,68	1,50	2,11	2,90	2,79	2,79	2,79
		b. PUD	-13,99	15,38	2,38	2,33	4,55	6,52	10,20	10,20
		Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	n/a	5,75	7,75	9,75	11,75	13,75	15,75	15,75

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan tabel (4.1) di atas, Tujuan pembangunan perikanan Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 adalah Meningkatkan pertumbuhan sub sektor perikanan, untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu dengan cara menentukan strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan perikanan serta tolak ukur pencapaiannya. Sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan langkah langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sehubungan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya perikanan serta terjadinya penurunan produktivitas akibat rendahnya daya dukung lingkungan, maka dibutuhkan manajemen pembangunan perikanan yang baik dan berkelanjutan. Disamping itu juga dengan adanya permasalahan di lapangan yang semakin kompleks dan bersifat multi dimensial, perlu perencanaan yang matang dan komprehensif agar misi-misi yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Pembangunan di bidang perikanan harus bisa memanfaatkan peluang-peluang serta potensi yang ada dan lebih menitikberatkan keberpihakan kepada nelayan/pembudidaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemangku kepentingan (*stakeholders*) perikanan perlu menetapkan tujuan, sasaran dan kebijakan strategis.

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan perikanan yang telah ditentukan, perlu adanya penentuan langkah langkah strategis, pada dinas perikanan sasaran yang hendak dicapai, yaitu meningkatnya produksi sektor perikanan dan pendapatan pelaku usaha perikanan dengan tiga indikator yaitu persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, persentase peningkatan produksi perikanan budidaya, dan peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan. Adapun Dinas Perikanan dalam mengambil strategi dan kebijakan pembangunan sektor perikanan yang didasarkan pada pendekatan

pembangunan yang diarahkan agar mampu memainkan peranan utama dalam perbaikan perekonomian daerah, dalam arti dapat memposisikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah dan membudayakan masyarakat pelaku usaha perikanan agar mampu mandiri dalam melaksanakan usaha di bidang perikanan. Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan dalam lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Sampang Hebat Bermartabat</b>			
<b>MISI 2 : Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Meningkatkan pertumbuhan sub sektor perikanan	Meningkakan produksi sektor perikanan dan pendapatan pelaku usaha perikanan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengupayaan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pembudidaya ikan dan nelayan melalui pelatihan, pembinaan, percontohan dan inovasi (pembelajaran)</li> <li>2. Pengoptimalan pemenuhan sarana dan prasarana budidaya ikan dan penangkapan melalui pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan dan penangkapan</li> <li>3. Peningkatan kualitas Kelembagaan Kelompok Perikanan (tangkap dan budidaya)</li> <li>4. Optimalisasi fungsi TPI sebagai Tempat Pelelangan Ikan</li> </ol>
		Meningkatkan produksi garam rakyat serta peningkatan pendapatan petambak garam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana serta pengetahuan petambak garam</li> <li>2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kemampuan</li> </ol>

<b>VISI : Sampang Hebat Bermartabat</b>			
<b>MISI 2 : Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
			kelompok perikanan  3. Melakukan pemanfaatan kawasan dan penggunaan sarana produksi perikanan budidaya
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan untuk meningkatkan pendapatan pengolah dan pemasar hasil perikanan	1. Pelaksanaan program gemar makan ikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya anak-anak  2. Pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha pengolahan ikan dan keanekaragaman produk olahan ikan  3. Pengadaan sarana dan prasarana pasca panen dan akses permodalan serta pemasaran.  4. Menyelenggarakan pembinaan terkait legalisasi kelompok
	Meningkatnya IKM pelayanan Perikanan	IKM pelayanan Perikanan	1. Meningkatkan pelayanan Perikanan

Untuk mendukung pelaksanaan strategi strategi di atas, perlu dirumuskan kebijakan. Arah kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan program kegiatan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang bersumber kepada kebijakan pemerintah pusat, kebijakan kementerian teknis, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kebijakan pemerintah Kabupaten Sampang serta kebijakan internal Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.

Dengan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan di atas maka dampak yang diharapkan adalah percepatan pembangunan perikanan, dampak yang lain yang

diharapkan adalah peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan di Kabupaten Sampang.

Inovasi dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya produk unggulan perikanan di Kabupaten Sampang dilaksanakan melalui “Sampang Crab Education” yaitu Pembelajaran, Pembesaran dan Penetasan rajungan sebagai produk unggulan di Kabupaten sampang, karena selama ini populasi rajungan tidak dapat di konsumsi secara masal.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam matrik Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan renstra ini.

Dalam merancang program dan kegiatan selama tahun 2019-2024, Dinas Perikanan merencanakan 3 program dan 7 kegiatan. Tentunya program dan kegiatan ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran yang telah mengacu pada sasaran-sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan renja Dinas Perikanan. Hal ini dilaksanakan demi menjamin konsistensi dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan pembangunan dalam rangka pencapaian visi-misi Dinas Perikanan sebagai satuan unit SKPD dan visi-misi Kepala Daerah terpilih dapat tercapai.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dinas Perikanan Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Pengelolaan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif”**. Indikator kinerja Dinas Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pebcapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>T.2 Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.</b>									
IT.3	Pertubuhan Ekonomi	5,23	5,42	5,63	5,73	5,83	5,92	6,02	6,02
IT.4	Indeks Gini	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
IT.5	Indeks Kinerja Agribisnis	74,52	74,52	74,94	75,21	75,68	76,12	76,53	76,53
<b>S. 10 Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif</b>									
IS.14	Persentase pertumbuhan PDRB sector perikanan	5,26	5,36	5,46	5,71	6,01	6,36	6,76	6,76

*Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019*

Tabel 7.2  
Keterhubungan Renstra Dinas Perikanan dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DINAS PERIKANAN		SASARAN RENSTRA DINAS PERIKANAN		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan PDRB sub sector perikanan					5,26	5,36	5,46	5,71	6,01	6,36	6,76	6,76
		Meningkatnya Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sector perikanan			5,26	5,36	5,46	5,71	6,01	6,36	6,76	6,76
			Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya /Petambak Garam										
			a. NTN			n/a	101,9	102,4	103,0	103,7	104,6	105,6	105,6
			b. NTPi			n/a	101	103	105	107	109	111	111
			c. NTPG			n/a	113	115	117	119	121	123	123

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DINAS PERIKANAN		SASARAN RENSTRA DINAS PERIKANAN		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan dan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dan garam								
					a. Budidaya	22,05	3,93	2,98	2,89	3,37	2,72	2,65	2,65
					b. Garam	103,24	-99,92	2,91	2,83	3,09	3,00	2,91	2,91
					Persentase peningkatan produksi budidaya perikanan								
					a. Laut	34,03	5,68	1,50	2,11	2,90	2,79	2,79	2,79
					b. PUD	-13,99	15,38	2,38	2,33	4,55	6,52	10,20	10,20
					Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (Nelayan/Pembudidaya /Petambak Garam)	n/a	5,75	7,75	9,75	11,75	13,75	15,75	15,75

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, 2019



## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perikanan pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 90,49 atau sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Masih minimnya kualitas dan kuantitas SDM dan anggaran pada Dinas Perikanan, Data dan informasi sebagai dasar perencanaan pengembangan perikanan, konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan perikanan, Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, Perencanaan program perikanan di daerah yang holistic, integrative, tematik dan spasial, Sinergitas proses perencanaan program perikanan nasional, regional dan perencanaan pengembangan perikanan di daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik, Optimalisasi system pengendalian dan evaluasi perencanaan program perikanan, Pelayanan permohonan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Pelayanan public yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Dinas Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG

**H. SLAMET JUNAIDI**

**LAMPPIRAN**







Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
							2019		2020		2021		2022		2023		
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target
			5	Cakupan pemenuhan jasa tenaga kebersihan	orang	7	10										
			6	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	jenis	35	37		37			37		37		37	
			7	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung	orang	1	1		1			1		1		1	
			8	Panel jaringan listrik	paket		1										
			9	Jumlah pengaman kantor	orang				3			3		3		3	
3.01.3.01.01.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah ATK	jenis	48	33	126,350,000.00	128,022,500.00		130,582,950.00	30	133,194,609.00	35	135,858,501.18	35	
			2	Jumlah barang cetakan	jenis	6	6		6		6		6		6		
			3	Jumlah barang pengadaan	lembar	4,366	4,500		5,000		6,000		7,000		7,500	8,000	
			4	Jumlah komponen instalasi listrik	jenis	35	17		16		16		16		16	16	
			5	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	macam	2	2		2		2		2		2	2	
			6	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	kotak	480,220	480,220	480,220	480,220		480,220		480,220		480,220	480,220	
			7	jumlah belanja modal kipas angin, jumlah router, jumlah antena wifi	buah		3,1,1										
3.01.3.01.01.01.03.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah koordinasi dalam daerah	bulan	12	12	207,075,000.00	12	235,725,000.00	12	240,439,500.00	12	245,248,290.00	12	250,153,255.80	12
			2	Jumlah koordinasi luar daerah	bulan	12	12		12		12		12		12	12	
<b>3.01.3.01.01.02.</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>323,550,000</b>	<b>100.00</b>	<b>251,867,000</b>	<b>100.00</b>	<b>256,904,340</b>	<b>100.00</b>	<b>262,042,427</b>	<b>100.00</b>	<b>264,102,418</b>	<b>100.00</b>
3.01.3.01.01.02.01.		Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	gedung	1	1	26,650,000.00	1	51,968,000.00	1	53,007,360.00	1	54,067,507	1	51,968,000	1
			2	jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pengecatan dan pemeliharaan jaringan listrik	kegiatan	0	-		3		3		3		3	3	
3.01.3.01.01.02.03.		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaannya	unit	3	3	71,700,000.00	3	82,699,000.00	3	84,352,980.00	3	86,040,039.60	3	87,760,840.39	3
3.01.3.01.01.02.04.		Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kantor	buah	32	1	225,200,000.00	-	117,200,000.00	20	119,544,000.00		121,934,880.00		124,373,577.60	30
			2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit/ jenis	32	1		27		30		30		30	30	
			3	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	unit/pake t	10	3		3		3		3		3	3	
			4	jumlah pengadaan alat pendingin,	unit	0	3										
			5	Jumlah komputer yang diadakan	unit	2	2		3		-		3		1	-	
			6	Jumlah printer yang diadakan	unit	3	3		1		-		3		-	2	
			7	Jumlah meubelair yang diadakan	paket	0	3				4		-		2	-	
			8	Jumlah meubelair yang dipelihara	unit	30	50		50		50		50		50	50	
			9	jumlah pengadaan peralatan studio visual	unit	0	2										
			10	Jumlah pengadaan papan informasi,	buah	0	2										
			11	jumlah pengadaan alat telepon fax		0	1										
3.01.3.01.01.03.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100.00	100.00	47,000,000	100.00	57,000,000	100.00	58,140,000	100.00	59,302,800	100.00	60,488,856	100.00
3.01.3.01.01.03.01.		Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	1	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi /seminar	ASN	1	26	47,000,000.00	26	57,000,000.00	26	58,140,000.00	26	59,302,800.00	26	60,488,856.00	26
3.01.3.01.01.04.		Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	1	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	100.00	100.00	45,000,000	100.00	45,000,000	100.00	47,250,000	100.00	51,975,000	100.00	57,172,500	100.00
3.01.3.01.01.04.01.		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan		Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK,	dok	6	6	15,000,000	6	15,000,000	6	16,250,000	6	17,975,000	6	18,172,500	6

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2019		2020		2021		2022		2023		target	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
3.01.3.01.01.04.02.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	dok		7	15,000,000	7	15,000,000	7	15,750,000	7	17,000,000	7	19,000,000	7	
3.01.3.01.01.04.03.		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1 Jumlah Dokumen SKM	dok	0	-	15,000,000	-	15,000,000		15,250,000		17,000,000		20,000,000		
			2 Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali	1	1		1		1		1		1		1	

2024		
Rp.	target	Rp.
	6,76	
	105.60	
	111.00	
	123.00	
	100.00	
	2.65	
	2.91	
	2.79	
	10.20	
	15.75	
	11119.00	
	27.00	
347,049,399		2,044,019,356
178,999,641.43		1,627,682,713
	5	
		352,125,000

2024		
Target Akhir RPJMD		
Rp.	target	Rp.
	970.00	
	318.00	
		1,333,150,000
		777,000,000
		100,000,000
970		970
318.00		318.00
3,615,769,122		
1,046,129,295.55		
204,707,023.22		
	4.85	
	28.89	
516,001,777.94	15.75	1,518,047,115
1,264,301,987.06	1.00	3,719,502,657
	10.00	
	1.00	
912,599,509	100.00	4,011,635,934
	6	
273,717,326.38	11	1,540,104,145
	72	
	53	
	36, 36, 15, 9	

2024		
Target Akhir RPJMD		
Rp.	target	Rp.
	37	
	1	
	1	
	3	
138,575,671.20	35	792,584,231
	36	
	38,000	
	97	
	12	
	480,220	
500,306,512	72	1,678,947,557
	72	
<b>477,276,196</b>	<b>100.00</b>	<b>1,835,742,381</b>
53,007,360	6	290,668,227
	15	
175,521,680.80	18	588,074,541
248,747,155.32	51	956,999,613
	148	
	3	
	9	
	9	
	9	
	300	
<b>120,977,712</b>	<b>100.00</b>	<b>402,909,368</b>
120,977,712.02	7	120,977,712.02
<b>62,889,750</b>	<b>100.00</b>	<b>309,287,250</b>
20,889,750	36	103,287,250

2024		
Target Akhir RPJMD		
Rp.	target	Rp.
20,000,000	42	101,750,000
22,000,000	-	104,250,000
	6	